

BAB III

PROFIL PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU) DAN PELAKSANAAN AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH DALAM POLITIK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)

A. PROFIL PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU)

1. Latar Belakang Sosiologis Berdirinya PKNU

Partai politik merupakan pilar demokrasi. Karena partai politik memiliki peran yang sentral dalam menentukan terwujudnya demokrasi. Dalam mewujudkan demokrasi pada suatu Negara, ada prasyarat yang mendasar yang harus dipenuhi didalamnya, yaitu adanya supremasi hukum. Setiap warga Negara harus mentaati dan menjunjung tinggi serta mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum.

Berpijak pada kesadaran seperti itu, adanya konflik kepengurusan di dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah diikhtiarkan penyelesaiannya melalui instrument demokrasi yang digariskan oleh ketentuan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 tahun 2002 tentang partai politik, yaitu musyawarah dan kemudian melalui pengadilan.

Konflik kepengurusan di dalam tubuh PKB bermula dari adanya pemberhentian Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB Dr. H. Alwi Shihab, karena yang bersangkutan diangkat menjadi Menteri Koordinator KesejahteraanRakyat Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu periode

tahun 2004-2009, dan yang bersangkutan telah bersedia untuk memangku jabatan tersebut.¹

Terpilihnya Dr. Alwi Shihab sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB dilakukan dalam forum pemusyawaratan tertinggi partai yang disebut Mukhtamar dan ditetapkan dalam Ketetapan Mukhtamar PKB. Namun kemudian diberhentikan tidak dalam forum yang sama dan atau setingkat Mukhtamar, melainkan hanya melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (Rapat Pleno DPP PKB) dan kemudian ditetapkan melalui Surat Keputusan DPP PKB (SK DPP PKB).²

Sebelum mengambil langkah hukum melalui proses pengadilan, sebenarnya telah diupayakan penyelesaian konflik kepengurusan PKB ini (Khususnya kasus pemberhentian Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB Dr. H. Alwi Shihab) melalui musyawarah atau yang biasa disebut *ishlah*. Para kiai khususnya yang tergabung dalam forum kiai Langitan, yang sejak awal berdirinya PKB merupakan *the founding fathers* serta dalam perjalanan kesejarahan PKB merupakan *stake holders* dari PKB, telah menyampaikan seruan (*taushiyah*) kepada DPP PKB agar Dr. H. Alwi Shihab dikembalikan fungsinya sebagai Ketua

¹ Muhammad Tohadi, SH MSI *tinjauan ilmu hukum tentang keabsahan kepengurusan partai bangsa pasca putusan Mahkamah Agung*. (Lakumham DPP PKB Maret 2006) Hal 244

² Surat Keputusan DPP PKB No. 0103/DPP-01/III/A.IV/2002

Umum Dewan Tanfidz DPP PKB guna mempertanggung jawabkan kinerjanya dihadapan mu'tamar.³

Oleh karena langkah korektif yang dilakukan para kiai ini tidak mendapatkan tanggapan yang positif, maka kemudian Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB Dr. H. Alwi Shihab mengambil langkah perjuangan hukum melalui proses peradilan sejalan dengan tuntunan dan *taushiyah* para alim ulama khususnya para kiai forum Langitan maupun UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Setelah proses panjang, maka dalam proses pengadilan yang telah sampai pada tingkat akhir di Mahkamah Agung (MA) telah memenangkan gugatan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB Dr. H. Alwi Shihab.

Masalah yang kemudian muncul adalah, bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 1896 K/PDT/2005 tertanggal, 5 November tersebut kemudian ditafsirkan oleh pihak yang kalah dalam perkara ini sebagai putusan yang tidak perlu dita'ati, karena menurut mereka putusan tersebut tidak secara tegas menyangkut kepengurusan mana yang sah. Tidak adanya sikap menghormati hukum dan ketidakpatuhan terhadap hukum dalam hal ini Putusan MA RI No. 1896 K/PDT/2005 tertanggal, 15 November 2005 tentu saja berakibat biasanya status hukum kepengurusan PKB, yang semestinyasudah jelas dan tegas. Kenyataan ini makin berlanjut ketika pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak memiliki ketegasan sikap hukum untuk

³ Muhammad Tohadi, SH, MSI Krinologis Peristiwa Konflik PKB, (Lakumham DPP PKB Maret 2006) Hal : 246

menindak lanjuti Putusan MA RI No. 1896 K/PDT/2005 tertanggal, 15 November 2005.⁴

Dalam ranah politik, sebagaimana banyak ditulis para ahli politik hukum, bahwa hukum kerap kali ditafsirkan berdasarkan sudut pandang kepentingan politiknya. Sedangkan budaya politik hukum seperti inilah yang justru menyebabkan tidak kunjung terwujudnya supremasi hukum di negeri ini. Karena itu, menjadi tugas kita bersama bahwa hukum hendaknya ditafsirkan dan diletakkan di atas semua kepentingan politik lebih politik praktis, dan harus dijadikan sebagai rel bagi semua orang dalam menapaki kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan seterusnya.

Dalam kerangka untuk menafsirkan Putusan MA RI No. 1896 K/PDT/2005 tertanggal 15 November 2005 secara obyektif dan tidak diintervensi kepentingan politik praktis, sangat arif tindakan DPP PKB meminta pendapat ahli hukum atau ilmu hukum. Karena pendapat ahli hukum atau ilmu hukum memiliki kewibawaan dan sifat yang lebih obyektif.

Demikianlah kronologis peristiwa konflik PKB yang selanjutnya berlangsung Mu'tamar II PKB alim ulama pada tanggal 1 sampai 2 Oktober di Surabaya. Fenomena tersebut menjadikan para ulama yang tergabung dalam Tim 17 untuk melahirkan partai baru yakni PKNU yang lahir pada tanggal 21 November 2006 di Pondok Pesantren Langitan, Widang Tuban, Jawa Timur.

⁴ Ibid Hal : 247

2. Visi dan Misi PKNU

Visi PKNU

Visi PKNU adalah menciptakan Negara dan bangsa yang adil, damai, dan sejahtera (*baldatun thoyyibatun wa rabbun ghafur*) sebagai perwujudan dari rasa keimanan yang berlandaskan keagamaan dan rasa cinta tanah air.

Misi PKNU

Misi PKNU tercermin dari tiga bentuk tanggungjawab yang diemban utama. Pertama adalah tanggungjawab keagamaan (*mas'uliyah diniyyah*). Yakni, ulama menjadi penjaga keberlangsungan agama Islam yang berdasarkan aqidah Ahlusunnah Wal Jama'ah (*mas'uliyah diniyyah Islamiyyah'ala thariqati Ahlusunnah Wal Jama'ah*) sebagai kerangka berpikir dan bertindak dalam beragama dan berbangsa sehingga antara agama dan negara tumbuh bersama saling mengisi dan tercapai harmonisasi.⁵

Tujuan dan Usaha Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU)

- a. Memperjuangkan tegaknya nilai-nilai Islam Ahlussunnah Wal-Jama'ah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945.

⁵ Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Bab V PAsal 7 (DPP PKNU 2007)

- c. Mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual.
- d. Mewujudkan tatanan politik nasional yang demokratis, religius, terbuka, bersih dan berbudi luhur dan berakhlakul karimah.

Untuk mencapai tujuan, Partai melakukan usaha sebagai berikut :

a. Bidang agama

Meningkatkan ketaqwaan dan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan kehidupan yang beradab dan bermartabat.

b. Bidang ideologi

Mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Bidang politik

Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menegakkan kedaulatan rakyat, mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya, melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil dan sejahtera.

d. Bidang hukum

Berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial.

e. Bidang ekonomi

Menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis.

f. Bidang sosial budaya

Berusaha membangun yang maju dan modern dengan tetap memelihara jati diri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

g. Bidang pertahanan dan keamanan

Membangun kesadaran setiap warga terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara, mendorong terwujudnya ketentraman dan keamanan masyarakat terhadap perlakuan perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi dalam masyarakat.

h. Bidang pendidikan

Berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap

lingkungan sosial disekitarnya, mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan.⁶

Tanggungjawab kedua yang dipikul ulama adalah dengan umat (*mas'uliyah ummatiyyah*). Yakni, ulama berupaya memenuhi tuntutan umat atas tiga hal yang menjadi kebutuhannya, antara lain kebutuhan primer (*dharuriyyah atau asasiyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) dan kebutuhan yang sifatnya aksesoris (*tahsiniyyah atau takmiliyyah*). Kebutuhan umat baik yang primer, sekunder maupun aksesoris ini menjadi tanggungjawab ulama untuk memenuhi agar tercapai kesejahteraan.

Ketiga, tanggungjawab ulama yang berkenan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (*mas'uliyah wathaniyyah*). Terkait tanggungjawab ini, para ulama menyakini bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final. Keyakinan ini harus senantiasa dikawal melalui artikulasi (perjuangan) politik ualama agar cita-cita negara Republik Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud sebaik baiknya.

3. Asas dan Prinsip Dasar PKNU

Partai berasaskan Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah. Prinsip perjuangan partai adalah pengabdian kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran, menumbuhkan persaudaraan yang sejati, persamaan dan

⁶ KH. Ma'ruf Amin Kenapa harus PKNU (20 Hujjah alasan pendirian Partai Kebangkitan Nasional Ulama) Hal : 15

kebersamaan, menjaga persatuan, perdamaian, toleransi dan tolong menolong, membela yang teraniaya serta menegakkan keadilan didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁷

Asas merupakan ciri khusus yang dapat membentuk karakter politik bagi sebuah partai. Bagi PKNU, asas Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah bermakna mendasar untuk membentuk karakter dan sikap politik yang moderat (*tawassuthiyyah*), toleran (*tasamuhiyyah*), reformatif (*ishlahiyyah*), dinamis (*tahowwuriyyah*), dan bermetode (*mahajiyyah*).

Adapun prinsip perjuangan partai lebih operasional lagi, tentang bagaimana mengaktualisasikannya dalam kehidupan nyata. Prinsip perjuangan PKNU adalah pengabdian kepada Allah SWT, menegakkan kebenaran dan keadilan, mewujudkan kebersamaan dan persaudaraan sejati sesuai dengan nilai-nilai Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah didalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁸

4. Susunan Kepengurusan PKNU

Susunan kepengurusan partai pada masing-masing tingkatan organisasi partai sebagaimana dimaksud pada pasal 12 anggaran dasar terdiri dari :

⁷ Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Bab III Pasal 3 – 4 (DPP PKNU 2007).

⁸ KH. Ma'ruf *Kenapa harus PKNU* (20 Hujjah alasan pendirian Partai Kebangkitan Nasional Ulama) Hal : 13

a. Dewan Mustasyar

Adalah memimpin tertinggi yang membimbing, mengendalikan dan menjaga kemurnian khittah perjuangan partai.

b. Dewan Syura

Adalah memimpin tertinggi partai yang membuat dan menetapkan pedoman umum kebijakan partai untuk menjadi rujukan utama pelaksanaan kebijakan-kebijakan partai.

c. Dewan Tanfidz

Adalah memimpin eksekutif partai yang membuat dan menjalankan kebijakan strategis partai, mengelola organisasi dan program partai.⁹

Untuk pertama kalinya susunan Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah sebagai berikut :¹⁰

a. Deklarator dipimpin oleh KH. Abdullah Faqih (selaku Rais/Ketua).

Anggota-anggota : KH. Abdullah Chudlori, KH. Ahmad Sofyan Miftahul Arifin, KH. Ahmad Warson Munawwir, KH. Muhaiminan Gunardo, KH. Idris Marzuki, KH. Nurul Huda Djalzuli, KH. Ma'ruf Amin, KH. Abdullah Sechal, KH. Abdul Hamid Baedhowi, KH. Sholeh Qosim, KH. Hasbullah Badawi, KH. Abdul Adzim Suhaimi, KH. Mas Muhammad Subadar, KH. Humaidi Dachlan, Lc, KH. M. Tahir Syarkawi, Habib Hamid Bin Hud Al-Atas, KH. Achmad Basyir, KH. Aniq Muhammadun.

⁹ Aggaran Dasar Aggaran Rumah Tangga (AD-ART) Partai Kebangkitan Nasional Ulama Bab III Pasal 3 – 4 (DPP PKNU 2007). Hal : 11

¹⁰ Ibid : Hal 15

- b. Dewan Mustasyar (Dewan Pertimbangan) dipimpin oleh KH. Ma'ruf Amin (selaku Rais/Ketua) :

Anggota-anggota : KH. Abdullah Faqih, KH. Ahmad Sofyan Miftahul Arifin, KH. Zaenal Abidin Munawwir, KH. Muhaiminan Gunardo, KH. Akhmad Basyir, KH. Abdullah Sechal, KH. Idris Marzuki, KH. Nurul Huda Djazuli, KH. Mas Muhammad Subadar, KH. Manshur Shaleh, KH. Hasbullah Badawi, KH. Afif Astari, KH. Abdul Baidhawi, Habib Syaqaq Al Jufri, KH. Abdul Jalil Ma'ruf, KH. Hasan Syarif, KH. Choirudin Rais, KH. Abdurrahman, KH. Ahmad Damiri, KH. Ahya Al Anshori, KH. Abdul Aziz Afandi, Habib Hamid Bin Hud Alatas, Hajjah Nihayah Achmad Siddiq, Hajjah Umroh Thalbah Mansur.

- c. Dewan Syura (Dewan Permusyawaratan)

Ketua : KH. Abdurrachman Chudlori

Wakil Ketua : KH. Ahmad Warson Munawwir, KH. Ubaidillah Faqih, KH. Anwar Iskandar, KH. Chumaidi Dahlan, Lc., KH. Muhammad Thohir Syarkawi.

Sekretaris Dewan Syura : Prof. Dr. H. Alwi Shihab

Wakil Sekretaris : KH. Drs. Ali As'ad

Anggota-anggota :

KHR. Muhammad Cholil As'ad, KH. Sholeh Qosim, KH. Hasan Aminuddin, KH. Muchtar Amin, KH. Machrus, KH. Abdul Haq, KH. TGK. Rajali Irsyad,

KH. Sulton Daeng Rowa, KH. Amir Asikin, KH. Abdul Latif Faqih, KH. Abdul Adzim Suhaimi, KH. Aniq Muhammadun, KH. Amin Siradj.

d. Dewan Tanfidz (Dewan Eksekutif) :

Ketua Umum : Drs. Chorul Anam

Ketua-ketua : R. Saleh Abdul Malik, Dr. H. Heflin Frinces, MA. Chudori Sitompul, SH, Ir. H. Muchtar Thahir, Muhammad Nasif, SE, Dra. Hj. Geferina Djohan, MA. Dra. Hj. Siti Ma'rifah, SH, MM.

Sekretaris Jedral : Drs. Muhammad Jamaluddin Shofisa, SH, MK, Muhammad Thohadi, SH, MS, Dra. H. Nur Hasan, Ir. Galih Fahrudin Qurbani, Zainal Abidin Amir, SIP, Drs. H. Ahmad Ni'am Syukri, Abdullah Mufied Mubarak.

Bendahara : H. Ridwan Zai

Wakil Bendahara : Dipo Nusanara, SH, Bambang Sungkono, H. Abdul Chalim, Drs. Irwan Cik Murod, Dra. Hj. Farichatul Aini, Drs. Jakin Sobri, MM.¹¹

5. Butir-butir Kesepakatan Rapat Tim 17 Pendiri PKNU

- a. Para kiai / Ulama sepakat (*ittifaq*) untuk mendirikan Partai Baru sebagai kelanjutan PKB Ulama.
- b. Nama partai disepakati Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), dengan catatan dapat disempurnakan ataupun diubah dalam Muktamar mendatang.

¹¹ Ibit Bab XV *Pasal 24* Hal : 17

- c. Lambang Partai disepakati tetap seperti rancangan semula dengan catatan dapat disempurnakan / diubah dalam Mukhtamar mendatang.
- d. Azas Partai disepakati Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah atau (maksudnya) adalah Islam ala (menurut faham) Ahlusunnah Wal Jama'ah.

Prinsip perjuangan partai akan disempurnakan dalam Mukhtamar mendatang dengan menghilangkan kata-kata yang dapat menimbulkan kontroversi.

- a. Tujuan partai adalah memperjuangkan tegaknya Islam Ahlusunnah Wal Jama'ah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila UUD 1945.
- b. Kepengurusan PKNU merupakan kelanjutan PKB ulama yang disempurnakan sesuai ketentuan internal partai dan akan diadakan perubahan atau pergantian kepengurusan baru yang definitif dalam Mukhtamar yang akan datang dengan mengacu pada kriteria pokok harus kader yang benar benar berpaham Ahlusunnah Wal Jama'ah.
- c. Struktur Kepengurusan Partai ditambah satu kotak atau kamar untuk Dewan Mustasyar, sehingga rumusannya menjadi sebagai berikut : Susunan Kepengurusan Partai di semua tingkatan terdiri dari : a) Dewan Mustasyar, b) Dewan Syura, dan c) Dewan Tanfidz. Dewan Mustasyar tidak termasuk dalam kategori kepengurusan harian, tetapi memiliki hak veto dalam segala proses penyelesaian persoalan Partai.

- d. Rapat Tim 17 merekomendasikan kepada partai (DPP PKNU) agar segera melaksanakan Mukhtar pertama, paling lambat pertengahan tahun 2007, apabila proses pendirian dan pendaftaran serta pengesahan partai oleh Departemen Hukum dan HAM dinyatakan telah selesai.¹²

Catatan :

Sebelum Rapat Tim 17 dilaksanakan (secara tertutup) terlebih dahulu diadakan pertemuan secara terbuka dengan maksud meminta masukan dari para hadirin yang ingin menyaksikan secara langsung jalannya Rapat Tim 17 tersebut. Setelah sambutan Shahibul Bait KH. Abdullah Faqih (juga selaku Ketua Tim 17) yang kemudian menunjuk KH. Ma'ruf Amin sebagai moderator pertemuan sekaligus memimpin Rapat Tim 17 dan diteruskan sambutan Ketua Dewan Syura PKB Ulama KH. Abdurrachman Chudlori (juga selaku Sekretaris Tim 17), maka dipersilakan KH. M. Syukron Makmun dan KH. Abdul Hamid Baidlowi untuk memberikan masukan seperlunya. Setelah itu dipersilakan Sdr. Mahrus dari Sidoarjo dan Ketua Dewan Syura DKI Jakarta KH. Mastari Latif MA. Untuk menyampaikan masukannya. Terakhir, sebelum ditutup do'a oleh KH. Achmad Sufyan Miftahul Arifin (Situbondo) dan KH. Abdullah Schal dari Bangkalan Madura oleh moderat KH. Ma'ruf Amin.¹³

¹² H. Abdullah Zain dan Muhammad Kaiyiz *9 Alasan Mengapa Kiai-Kiai Tidak Lagi Bersama Gus Dur* (DPP PKNU Maret 2007) Hal : 13

¹³ KH. Ma'ruf Amin *Kenapa harus PKNU (20 Hujjah Alas an Pendirian Partai Kebangkitan Nasional Ulama) 2007*

TIM 17 PENDIRIAN
PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA (PKNU)
Di Pondok Pesantren Langitan
Selasa, 21 November 2006

- KH. Abdullah Faqih (Langitan, Tuban, Jawa Timur)
- KH. Ma'ruf Amin (Tanara, Banten)
- KH. Abdurrachman Chudlori (Tegalrejo, Magelang, Jateng)
- KH. Ahmad Sufyan (Panji, Situbondo, Jawa Timur)
- KH. M. Idris Marzuki (Lirboyo, Kediri, Jawa Timur)
- KH. A. Warson Munawwir (Krapyak, DI Yogyakarta)
- KH. Muhaiminan Gunardo (Parakan, Temanggung, Jateng)
- KH. Abdullah Schal (Bangkalan, Madura, Jawa Timur)
- KH. Sholeh Qosim (Sepanjang, Sidoarjo, Jawa Timur)
- KH. Nurul Huda Djalzuli (Ploso, Kediri, Jawa Timur)
- KH. Chasbullah Badawi (Cilacap, Jawa Tengah)
- KH. Abdul Adzim Suhaimi, MA (Mampang Prapatan, DKI Jakarta)
- KH. Mas Muhammad Subadar (Pasuruan, Jawa Timur)
- KH. A. Humaidi Dahlan, Lc (Banjarmasin, Kalimantan Selatan)
- KH. M. Thahir Syarkawi (Pinrang, Sulawesi Selatan)
- Habib Hamid Bin Hud Al-Attos (Cililitan, DKI Jakarta)
- KH. Aniq Muhammadun (Pati, Jawa Tengah)

B. Pelaksanaan Politik Partai Kebangkitan Nasional Ulama' (PKNU) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW 1428 H pada Sabtu, 31 Maret 2007, sebanyak 17 kiai Nadhlatul Ulama (NU) yang di kenal dengan Forum Langitan mendeklarasikan berdirinya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) di Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban. Inilah puncak dari perpecahan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) antara pendukung Forum Langitan dengan KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan Muhaimin Iskandar.

PKNU sendiri didirikan pada 21 dengan azas Islam Ahlusunnah wal Jama'ah yang mengusung semangat nasionalis religius dan mengambil posisi sebagai partai terbuka. Di struktur kepengurusan harian dipimpin KH Abdurrahman Chudlori sebagai ketua Dewam Syuro dan Drs. Choirul Anam sebagai Ketua Umum. Selain itu, di struktur PKNU juga terdapat Dewan Mustasyar yang berfungsi sebagai pengarah dan penentu kebijakan partai yang mendasar. Lembaga ini beranggotakan para kiai sepuh dan para habib dengan KH Ma'ruf Amin (Banten) sebagai Rois (Ketua).

Dari jajaran deklator atau yang dikenal dengan Tim - 17, hanya KH Abdullah Schaal (Bangkalan) dan KH Idris Marzuqi (Ponpes Lirboyo, Kediri) yang berhalangan hadir karena sakit. Menurut Kiai Ma'ruf Amin, keterlibatan kiai ulama di PKNU bukanlah untuk mengejar kedudukan politik. Melainkan memenuhi tanggung jawab keulamaan, salah satunya adalah tanggung jawab yang berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa para ulama (NU) meyakini bentuk

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah final. Keyakinan itu harus dikawal melalui perjuangan politik agar cita-cita negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada kepentingan politik pribadi, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tegas kiai yang juga Rais Syuriah PBNU itu²⁰.

Para ulama NU mendirikan PKNU karena NU sebagai organisasi masyarakat memilih mengambil jarak dengan partai politik. Sementara partai yang ada dinilai kurang sejalan dengan aspirasi para kiai, terutama dalam hal penataan dan perbaikan kehidupan umat. Menurut Kiai Ma'ruf Amin, ada banyak partai. Tetapi tidak ada satupun yang sejalan dengan prinsip dan pola perjuangan para kiai disini. Sehingga para kiai memutuskan membuat alat perjuangan sendiri. Insya Allah, yang ini tidak akan durhaka lagi, Katanya.

Karena lanjut Kiai Ma'ruf Amin, ada yang khas di PKNU. Yaitu para kiai punya mekanisme yang kuat untuk menjaga para pengurus agar tetap berada di rel yang benar. Agar tetap istiqomah *haq wal adl*. Tegasnya, dengan berasal Islam Ahlusunnah wal Jama'ah, PKNU tidak kemudian diartikan akan mengarahkan Indonesia menjadi negara Islam. PKNU meyakini NKRI adalah bentuk final negara ini, tambahnya.

Kiai Ma'ruf Amin menjelaskan, PKNU mempunyai tiga pandangan dalam meletakkan Syariat Islam didalam bingkai NKRI, sehingga tidak akan terjadi

²⁰ Fathorrasjid, *Indonesia Negeri Kiai*, KH. A. Sofyan Miftahul Arifin, Buka "Kiai Kampungan" Surabaya, Elveka Institute, 2008, hal. 94.

benturan antara Islam dengan negara serta antara umat Islam dengan penganut agama lain. Pertama, PKNU mendukung dan mengupayakan formalisasi syariat yang ruanglingkupnya *privat* dan tidak mengundang keberatan pemeluk agama lain. Kedua, terkait persoalan yang menyentuh wilayah publik, PKNU akan berusaha memasukkan substansi atau nilai-nilai dasar agama Islam. Ketiga, apabila hal-hal tersebut tidak bisa dicapai, PKNU akan memperjuangkan terciptanya kesesuaian aturan dengan nilai dari tujuan-tujuan syariat.

Dengan demikian, lanjut Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat itu, agama dan negara bisa tumbuh bersama-sama dan saling mengisi, sehingga tercapai harmonisasi. Hal ini dimungkinkan karena azas PKNU itu Islam Ahlussunnah Wal Jamaah yang bermakna mendasar untuk membentuk karakter dan sikap politik yang moderat, toleran, reformatif, dinamis, dan bermetode.

Menurut ketua umum DPP PKNU Drs. Choirul Anam, pihaknya yakin suara nahdliyin yang secara nasional kurang lebih 18 persen bisa dipungut PKNU. Karena, PKNU ini merupakan wujud baru Partai NU dulu. Pada Pemilu 1955 dan 1971, Partai NU meraup suara 18 persen dari total suara pemilih nasional. Karena itu, Cak Anam yakin, PKNU yang didirikan para ulam NU ini dalam menargetkan perolehan suara 18 persen pada pemilu 2009.

Dengan basis utama NU, maka PKNU yakin target 18 persen tidak mengada-ada. Ia yakin, massa PKB Jawa Timur (Jatim) akan pindah ke PKNU karena kiai-kiai berpengaruh di Jatim adalah nyata-nyata atau notabone merupakan pendiri PKNU. Perolehan 11 juta suara nasional PKB pada pemilu 2004, sebanyak 7 juta

diantaranya merupakan sumbangan dari Jatim, lanjut Cak Anam yang juga Ketua DPW PKB Jatim dan Ketua Umum DPP PKB hasil Muktamar Surabaya ini²¹.

PKNU mengedepankan politik dengan warna baru yang selama ini gagal dilakukan oleh partai politik yang ada. Warna politik itu adalah politik yang berangkat dari visi keagamaan, melalui arahan dan bimbingan ulama. PKNU menghindari politik yang berujung pada organisasi kekuasaan seperti terjadi di masa sekarang. Politik semacam itu terbukti telah menghasilkan persoalan-persoalan kebangsaan yang menurunkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dan gagal meningkatkan kualitas kehidupan rakyat.

PKNU meyakini bahwa upaya mewujudkan kehidupan rakyat yang adil dan makmur haruslah menjadi komitmen perjuangan politik dari seluruh kekuatan politik yang ada di tanah air. Oleh karena itu, PKNU tidak menutup diri untuk bekerja sama dengan partai politik yang mempunyai kesamaan visi, misi, tujuan dan platform.

PKNU melihat bahwa saat ini bangsa Indonesia masih berada tahap transisi demokrasi, belum menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada konsolidasi demokrasi yang ditunjukkan oleh adanya ketaatan pada konstitusi dan penegakan hukum (*law enforcement*) secara serius. Demokrasi di Indonesia masih berkutat pada tahapan yang prosedural. Akibatnya, proses demokrasi itu sendiri bersifat elitis.

Dalam konteks demokratisasi di Indonesia, PKNU memandang bahwa demokrasi harus segera di kembalikan kepada alur yang semestinya. Yakni, menjadi

²¹ Sambutan Khoirul Anam Ketua DPP PKNU, *Disampaikan di depan Kader PKNU, di Pondok Pesantren segerbang Kertosusilo di Langitan Tuban* (Selasa 27 Februari 2007)

alat bagi rakyat untuk mengkonversi aspirasinya menjadi kebijakan pemerintah. PKNU menginginkan demokrasi yang benar-benar mencerminkan aspirasi dan kehendak rakyat, bukan keinginan kelompok elit.